

PJ WALI KOTA SALATIGA AKHIRI MASA TUGAS, TINGGALKAN DANA Rp5,4 MILIAR UNTUK TWR



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/02/Gerbang-TWR-Salatiga.jpg>

Isi Berita:

Esposin, SALATIGA -- Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, mengakhiri masa tugasnya dengan meninggalkan warisan penting bagi pembangunan daerah. Salah satunya adalah tambahan dana Rp5,4 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pempov Jateng) untuk mempercepat penyelesaian Taman Wisata Religi (TWR), yang diharapkan menjadi simbol toleransi dan keberagaman di Salatiga.

Dana tersebut akan digunakan pada tahun 2025 untuk mempercepat proyek yang sempat mangkrak. Yasip mengungkapkan, suntikan dana ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Salatiga sebagai kota toleransi dengan destinasi wisata religi unggulan.

“Dengan tambahan dana ini, kami berharap TWR dapat segera menjadi ikon baru Salatiga yang mencerminkan harmonisasi dan keberagaman,” ujar Yasip dalam diskusi bersama masyarakat, Rabu (19/2/2025).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Salatiga, KH M. Nur Rofiq, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, dana tambahan ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam membangun kawasan yang merepresentasikan semangat persatuan.

“Dana tambahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Taman Wisata Religi sebagai simbol kebersamaan dan toleransi di Salatiga,” kata Rofiq.

Proyek Pembangunan di Salatiga

Sebelumnya, pada tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga telah mengalokasikan Rp3 miliar dari APBD untuk persiapan lahan TWR. Namun, kondisi kawasan tersebut sempat terbengkalai, dengan banyak area ditumbuhi semak liar dan gerbang masuk yang rusak.

Kepala Bappeda Salatiga, Agung Hendratmiko, bahkan mengusulkan tambahan anggaran Rp9,4 miliar untuk membangun aula serta meningkatkan fasilitas di area wisata religi tersebut.

Selain proyek TWR, Yasip juga meninggalkan sejumlah capaian dan proyek pembangunan strategis lainnya, di antaranya:

Dana Hibah Provinsi Rp32 Miliar

- Termasuk Rp5,4 miliar untuk TWR.
- Pembangunan Exit Tol Pattimura Salatiga, yang direncanakan dibuka tahun ini.

Proyek Infrastruktur

- Pasar Raya 2 Salatiga, yang saat ini dalam tahap penyelesaian dengan dukungan investor Sanur Bali Group.
- Pembaruan jaringan PDAM untuk meningkatkan layanan air bersih bagi warga.

Proyek yang Masih Tertunda

- Pasar Jetis, masih dalam negosiasi antara investor lama dan baru.
- Hotel Mercure, belum dapat direalisasikan.
- 12 aset daerah masih dalam proses penyewaan, termasuk Gedung Pertemuan Daerah yang memiliki potensi meningkatkan PAD hingga 25 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
- Meski masa jabatannya telah usai, Yasip menekankan bahwa beberapa proyek masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait kemacetan di Jalan Pattimura, yang diprediksi akan semakin padat setelah exit tol dibuka.

“Harus ada langkah antisipasi agar arus lalu lintas tetap lancar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang masih dihadapi, pembangunan Salatiga diharapkan dapat terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. (Hawin Alaina)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/pj-wali-kota-salatiga-akhiri-masa-tugas-tinggalkan-dana-rp54-miliar-untuk-twr-2062351>, “Pj Wali Kota Salatiga Akhiri Masa Tugas, Tinggalkan Dana Rp5,4 Miliar untuk TWR”, tanggal 19 Februari 2025.

2. <https://lingkarjateng.id/2025/02/mangkarak-proyek-twr-salatiga-dapat-suntikan-dana-rp-54-miliar-dari-pemprov-jateng/>, “Mangkarak, Proyek TWR Salatiga Dapat Suntikan Dana Rp 5,4 Miliar dari Pemprov Jateng”, tanggal 20 Februari 2025.
3. <https://harian7.com/twr-salatiga-disuntik-anggaran-rp54-miliar-dari-pemprov-jateng-bakal-jadi-ikon-toleransi-yang-siap-berdiri-megah/>, “TWR Salatiga Disuntik Anggaran Rp5,4 Miliar dari Pemprov Jateng”, tanggal 20 Februari 2025.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi